

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing

daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik.

Sementara itu Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen yang penting yang mengundang publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah

yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial, Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, Pembinaan unit pelaksanaan teknis, Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, sarana, dan prasarana serta rumah tangga.

Disamping itu juga dalam melakukan program dan kegiatannya Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam hal ini belanja. Belanja daerah terbagi atas dua pos bagian antara lain belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan pada belanja tersebut terdapat selisih antara anggaran dengan realisasi yang cukup signifikan. Selisih antara anggaran dengan realisasi tersebut mungkin terjadi karena adanya penghematan atau efisiensi anggaran

atau karena adanya program atau kegiatan yang tidak terlaksana oleh pemerintah dengan baik.

Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan Belanja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi**  
**Nusa Tenggara Timur**

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/berkurang (Rp)
2014	Belanja Daerah	37.559.200.000	36.492.668.601	(1.066.531.339)
	Belanja Tidak Langsung	16.283.800.000	15.912.797.188	(371.002.812)
	Belanja Langsung	21.275.400.000	20.579.871.413	(695.528.587)
2015	Belanja Daerah	44.071.134.000	42.880.239.328	(1.190.894.672)
	Belanja Tidak Langsung	17.360.639.000	17.425.262.199	64.623.199
	Belanja Langsung	26.710.495.000	25.454.977.129	(1.255.517.817)
2016	Belanja Daerah	43.789.076.000	43.333.025.553	(456.050.447)
	Belanja Tidak Langsung	18.448.253.000	18.459.003.873	10.750.873
	Belanja Langsung	25.340.823.000	24.874.021.680	(466.801.320)

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018*

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada tabel 1.1 diatas, secara umum realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai dengan anggarannya. Pada tahun 2014 pos belanja tidak langsung anggaran sebesar Rp 16.283.800.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 15.912.797.188 selisih atau variansnya sebesar Rp 371.002.812 atau 2,33% dan pada pos belanja langsung anggarannya

sebesar Rp 21.275.400.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 20.579.871.413 selisih atau variansnya sebesar Rp 695.528.587 atau 3,37%. Tahun 2015 pada pos belanja tidak langsung anggaran sebesar Rp 17.360.639.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 17.425.262.199 selisih atau variansnya sebesar Rp 64.623.199 atau 0,37% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp 26.710.495.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 25.454.977.129 selisih atau variansnya sebesar Rp 1.255.517.817 atau 4,93%. Sedangkan pada tahun 2016 pos belanja tidak langsung anggaran sebesar Rp 18.448.253.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 18.459.003.873 selisih atau variansnya sebesar Rp 10.750.873 atau 0,05% dan pada pos belanja langsung anggaran sebesar Rp 25.340.823.000 yang terealisasi sebesar Rp 24.874.021.680 selisih atau variansnya sebesar Rp 466.801.320 atau 1,87%.

Terjadinya selisih anggaran antara realisasi dengan anggaran pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang paling besar selisihnya adalah pada pos belanja langsung. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 selisih anggaran yang terjadi cukup besar yakni pada tahun 2014 selisih anggarannya sebesar Rp 695.528.587 tahun 2015 sebesar Rp 1.255.517.817 dan tahun 2016 sebesar Rp 466.801.320. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya pemerintah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik. Padahal belanja langsung itu merupakan belanja yang dianggarkan pemerintah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatannya bagi kepentingan publik.

Analisis varians adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, melaporkan dan menjelaskan varians atau selisih hasil yang sesungguhnya dari hasil yang diharapkan. (Menurut Glen, Hilton, dan Gordon 2000:498). “Analisis varians mencakup analisis matematis dari dua perangkat data untuk mendapatkan penyebab terjadinya suatu selisih atau varians”. Sebab-sebab terjadinya selisih tersebut perlu dianalisis kerana merupakan petunjuk ketidaktepatan dari pelaksanaan ataupun tidak tepatnya standar. Selisih yang perlu dianalisis tidak hanya selisih yang tidak menguntungkan tetapi juga selisih yang menguntungkan, sebab selisih yang menguntungkan tersebut bisa saja diperoleh karena pemerintah menetapkan anggarannya terlalu tinggi.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Selisih Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- b Apa dampak dari selisih anggaran belanja ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b Untuk mengetahui dampak dari selisih anggaran belanja

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan bagi peneliti-peneliti lain, terutama penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya selisih anggaran belanja.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah informasi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan konsep strategis yang dituangkan dalam kebijakan, sehingga penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut bisa dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Bagi Mahasiswa: hasil dari penelitian ini bagi peneliti untuk dapat mengembangkan penalaran, serta untuk dapat mengetahui kemampuan peneliti sendiri dalam penerapan ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.